



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI SATUAN WILAYAH
PENGEMBANGAN GERBANGKERTOSUSILA DAN
SEKITARNYA TAHUN 2003-2017**

SKRIPSI

Oleh

Putri Lestari Widyaningtyas

NIM 150810101033

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI SATUAN WILAYAH
PENGEMBANGAN GERBANGKERTOSUSILA DAN
SEKITARNYA TAHUN 2003-2017**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Putri Lestari Widyaningtyas

NIM 150810101033

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rini Siswati dan Ayahanda Jasim yang tercinta, yang senantiasa tulus memberikan doa serta menemani perjuangan ananda dari SD hingga perguruan tinggi. Segala cinta dan kasih sayang tucurahkan untuk ananda, menemani ananda dalam suka duka, memberi semangat dikala ananda tengah mendapat rintangan bahkan rela tidak tidur untuk menemani ananda mengerjakan berbagai tugas dan semua pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Untuk adikku Yousif Abdul Rahman yang tersayang, menjadi teman berbagi dikala susah dan senang, dan memberi semangat dikala ada rintangan yang menghadang sehingga mampu melewati semua dengan baik.
3. Untuk guru-guruku yang tersayang dari SD hingga perguruan tinggi yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk memberikan ilmu dengan ketulusan hati sehingga ananda bisa menyelesaikan segala tugas yang diberikan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Untuk rekan-rekan seperjuangan IESP 2015 yang telah bersama-sama dalam menyelesaikan studi ini.
6. Untuk sahabatku yang selalu mendukung dan memberiku semangat Nelly Novia sari, M. Kamal Abdul Nasir, Mira Ely, Fiah dan Edelweiss tercinta.
7. Untuk salah satu orang Mochamad Dermawan Adi Laksono terimakasih karena telah memberikanku dukungan saat semua proses ini sedang berlangsung.
8. Untuk seluruh keluarga, rekan, sahabat yang tak bisa saya ucapkan satu persatu terimakasih atas dampingan kalian saya bisa sampai dititik ini

MOTTO

“Cinta kepada Allah sama seperti cahaya terang. Tanpanya, kamu bagaikan terombang ambing di lautan kegelapan.”

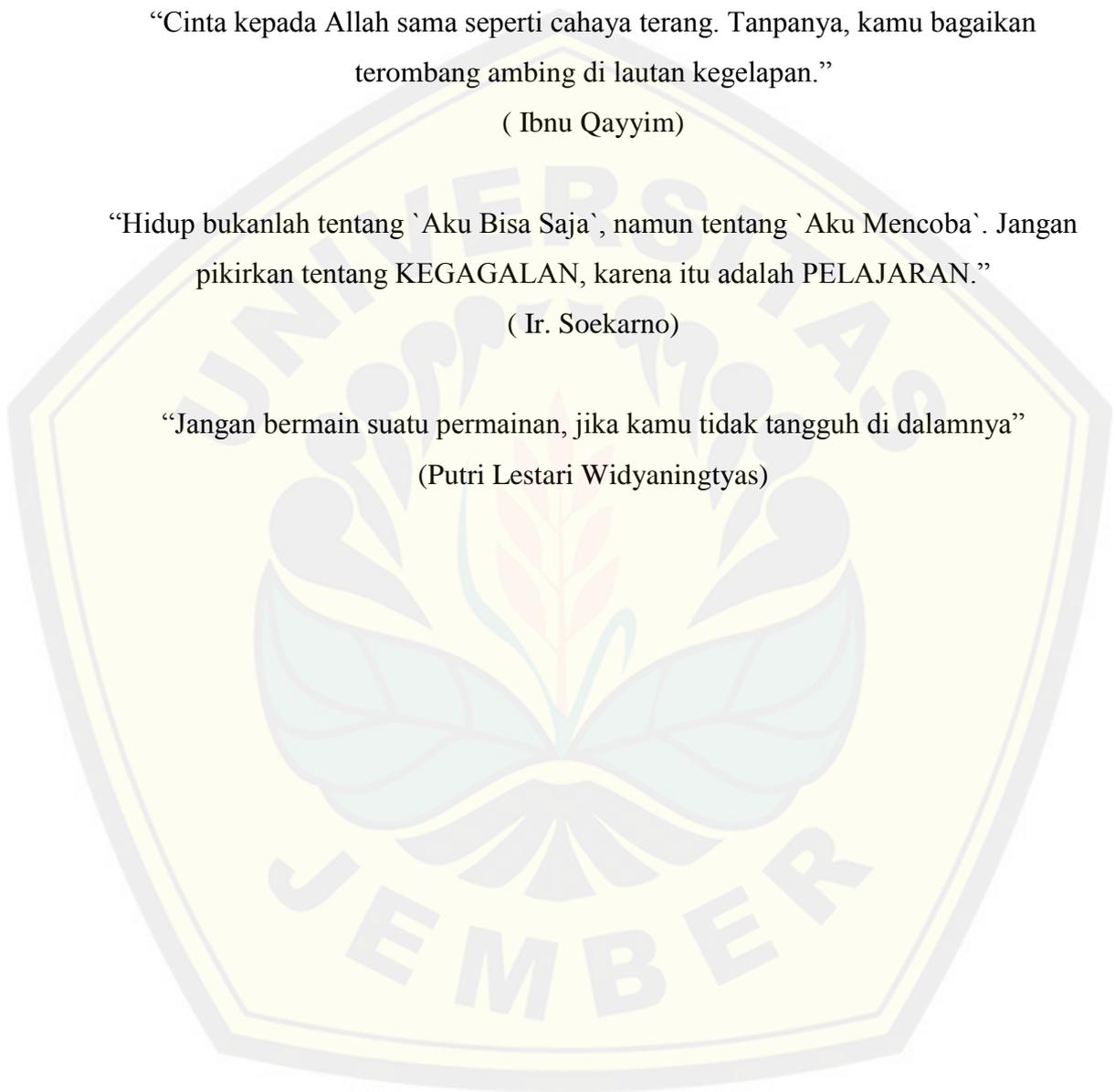
(Ibnu Qayyim)

“Hidup bukanlah tentang `Aku Bisa Saja`, namun tentang `Aku Mencoba`. Jangan pikirkan tentang KEGAGALAN, karena itu adalah PELAJARAN.”

(Ir. Soekarno)

“Jangan bermain suatu permainan, jika kamu tidak tangguh di dalamnya”

(Putri Lestari Widyaningtyas)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Lestari Widyaningtyas

NIM : 150810101033

Judul : Pengaruh Dana alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Satuan wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003 – 2017.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 7 Oktober 2019

Yang Menyatakan,

Putri Lestari Widyaningtyas
NIM. 150810101033

SKRIPSI

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM , DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN GERBANGKERTOSUSILA DAN SEKITARNYA TAHUN 2003 – 2017.

Oleh

Putri Lestari Widyaningtyas

NIM. 150810101033

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Drs. Agus Luthfi., M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003 – 2017

Nama Mahasiswi : Putri Lestari Widyaningtyas
NIM : 150810101033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal persetujuan : 20 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Agus Luthfi., M.Si.
NIP. 196505221990021001

Dr. Lilis Yuliati, SE., M.Si.
NIP. 196907181995122001

Mengetahui
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM , DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN GERBANGKERTOSUSILA DAN EKITARNYA TAHUN 2003 – 2017.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Putri Lestari Widyaningtyas

Nim : 150810101033

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal

31 Oktober 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
2. Sekertaris : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. (.....)
NIP. 198103302005011003
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, M.Si. (.....)
NIP. 196101221987022002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19710727 199512 1001

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di satuan wilayah Pengembangan
Gerbangkertosusila dan Sekitarnya tahun 2003 – 2017

Putri Lestari Widyaningtyas

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara dana perimbangan yang terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan perekonomian di satuan wilayah gerbangkertosusila dan sekitarnya yang meliputi kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan dari tahun 2003-2017. Data yang digunakan adalah sekunder dimana data tersebut berupa data DAU, DAK, DBH, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di wilayah gerbangkertosusila dan sekitarnya. Metode yang digunakan adalah metode data panel dimana DAU, DAK, dan DBH sebagai variabel bebas (Independent variable) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat (Dependent variable). Berdasarkan hasil estimasi, DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien determinasi 0.380373. Untuk DAK juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien determinasi 0.131251. hal ini juga berlaku untuk DBH yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien determinasi sebesar 0.371378. dari nilai R-squared sebesar 0.944039 menunjukkan bahwa variabel dalam model mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah gerbangkertosusila sebesar 94% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Kata Kunci :DAU, DAK, DBH, PDRB, data panel

The Effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund on Economic Growth in the Gerbangkertosusila Development Area and Surrounding Area 2003 – 2017

Putri Lestari Widyaningtyas

Departement of Economics and Development Study, Faculty of Economics and Bussiness, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between balancing funds consisting of general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds on economic growth in the Gerbangkertosusila and surrounding area units which include Gresik, Bangkalan, Regency and Mojokerto, Surabaya, Regency Sidoarjo and Lamongan Regency from 2003-2017. The data used are secondary where the data is in the form of DAU, DAK, DBH, and economic growth (GRDP) data in the territory of the gate of the paper and surrounding areas. The method used is the panel data method in which DAU, DAK, and DBH are independent variables and economic growth as dependent variables. Based on the estimation results, DAU has a positive and significant effect on economic growth with a coefficient of determination of 0.380373. For DAK also has a positive and significant influence on economic growth with a coefficient of determination of 0.131251. This also applies to DBH which has a positive and significant effect on economic growth with a coefficient of determination of 0.371378. of the R-squared value of 0.944039 shows that the variables in the model affect economic growth in the area of the gate of the island paper by 94% and the rest is influenced by variables outside the model.

Keywords : DAU, DAK, DBH, PDRB, Panel data

RINGKASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003-2017; Putri Lestari Widyaningtyas. 150810101033, 2019; 105 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya guna mewujudkan tujuan masyarakat untuk mensejahterakan, adil, dan makmur. Dengan adanya tujuan tersebut, mengingat luasnya Indonesia maka membuat pemerintah harus melakukan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dengan diberikannya otonomi daerah terhadap semua daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2015:198).

Untuk meningkatkan pembangunan daerah maka diperlukan dana/ anggaran untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Jika APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menjadi cerminan kemajuan perekonomian di tingkat nasional, maka APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan cerminan dari kemajuan perekonomian daerah.

Dana perimbangan yang di dapatkan oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat terbagi menjadi tiga macam menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu Dana alokasi Umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), dan Dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat

darurat. Selain itu pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiha). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau cara lain dari ini adalah gabungan antara data subjek dan data dokumenter (*Documentary Data*).

Singkatnya, penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa panel data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) SWP Gerbangkertasusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten sidoarjo dan Kabupaten Lamongan dengan menggunakan data tahun 2003 hingga tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel, dimana dalam analisis data panel terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu Pendekatan Model Pooled Least Square (*Common Effect*), Pendekatan Model Efek Tetap (*Fixed Effect*), Pendekatan Model Efek Acak (*Random Effect*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu Pendekatan Fixed Effect Model dan *Random Effect Model*. Selain itu agar model yang digunakan tidak mengalami bias, maka juga digunakan uji ekonometrika yang meliputi uji Multikolinieritas, uji Heteroskedasitas, uji Autokorelasi, dan uji Normalitas.

Hasil dari penelitian ini dimana menggunakan uji hausman menetapkan bahwa metode yang paling tepat yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Untuk uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah Multikolinieritas, tidak mengalami masalah Heteroskedasitas, tidak terjadi Autokorelasi, dan tidak terdistribusi dengan normal. Karena model yang

digunakan adalah Fixed Effect Model maka asumsi normalitas tidak di butuhkan lagi.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0.380373. Hal ini artinya ketika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya sebesar 0.380373. Sedangkan Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi positif sebesar 0.131251. Hal ini menunjukkan bahwa DAK mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya sebesar 0.131251. Selanjutnya untuk variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi positif sebesar 0.371378. Hal ini menunjukkan bahwa DBH mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya sebesar 0.001179.

Kesimpulan dari penelitian ini Ketiga variabel tersebut yaitu DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan konstan terhadap pertumbuhan ekonomi di SWP Gerbangkertosusilo tahun 2003 - 2017. Perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang terus menerus dilakukan akan mengembangkan sketor-sektor perekonomian yang ada di kawasan SWP Gerbangkertosusilo. Sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik jika dikelola dengan bijak oleh masing-masing wilayah atas alokasi dari pemerintah daerah yang telah diberikan guna mengembangkan sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Dana alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Satuan wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila dan Sekitarnya tahun 2003 - 2017”*. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, dorongan dan kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Riniati, M.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P., selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi pPembangunan;
4. Bapak Dr. Drs. Agus Luthfi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan yang dapat memotivasi saya dan kesabaran, keikhlasan, yang tidak dapat dinilai apapun dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahan yang dapat memotivasi saya dan kesabaran, keikhlasan, yang tidak dapat dinilai apapun dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas nasehat, arahnya dan bimbinganya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Ibunda Rini Siswati dan Ayahanda Jasim yang tercinta, yang senantiasa tulus memberikan doa serta menemani perjuangan ananda dari SD hingga perguruan tinggi. segala cinta dan kasih sayang tucurahkan untuk ananda, menemani ananda dalam suka duka, memberi semangat dikala ananda tengah mendapat rintangan;
9. Untuk adikku Yousif Abdul Rahman yang tersayang, menjadi teman berbagi dikala susah dan senang, dan memberi semangat dikala ada rintangan yang menghadang sehingga mampu melewati semua dengan baik;
10. Untuk guru-guruku yang tersayang dari SD hingga perguruan tinggi yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk memberikan ilmu dengan ketulusan hati sehingga ananda bisa menyelesaikan segala tugas yang diberikan;
11. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
12. Untuk rekan-rekan seperjuangan IESP 2015 yang telah bersama-sama dalam menyelesaikan studi ini;
13. Untuk Sahabatku yang selalu mendukung Nelly, Kamal, Mira, dan Edelweiss;
14. Untuk salah satu orang Mochamad Dermawan Adi Laksono terimakasih karena telah memberikanku dukungan saat semua proses ini sedang berlangsung.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 7 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	9
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	14
2.1.3 Desentralisasi Fiskal	17
2.1.4 Dana Perimbangan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	33

2.4 Hipotesis	34
BAB 3. METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Jenis dan Sumber Data	35
3.2 Metode Analisis	36
3.2.1 Analisis Data Panel	36
3.2.2 Uji Statistik	39
3.2.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.3 Definisi Operasional Variabel	43
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum	45
4.1.1 Keadaan Geografis Kawasan Gerbangkertosusila	45
4.1.2 Keadaan Perekonomian Kawasan Gerbangkertosusila	47
4.2 Hasil Analisis Data	53
4.2.1 Hasil Chow Test dan Hausman Test	53
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel	54
4.2.3 Uji Statistik	56
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	58
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan Sekitarnya	62
4.3.2 Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan Sekitarnya	64
4.3.3 Pengaruh DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan Sekitarnya	65
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

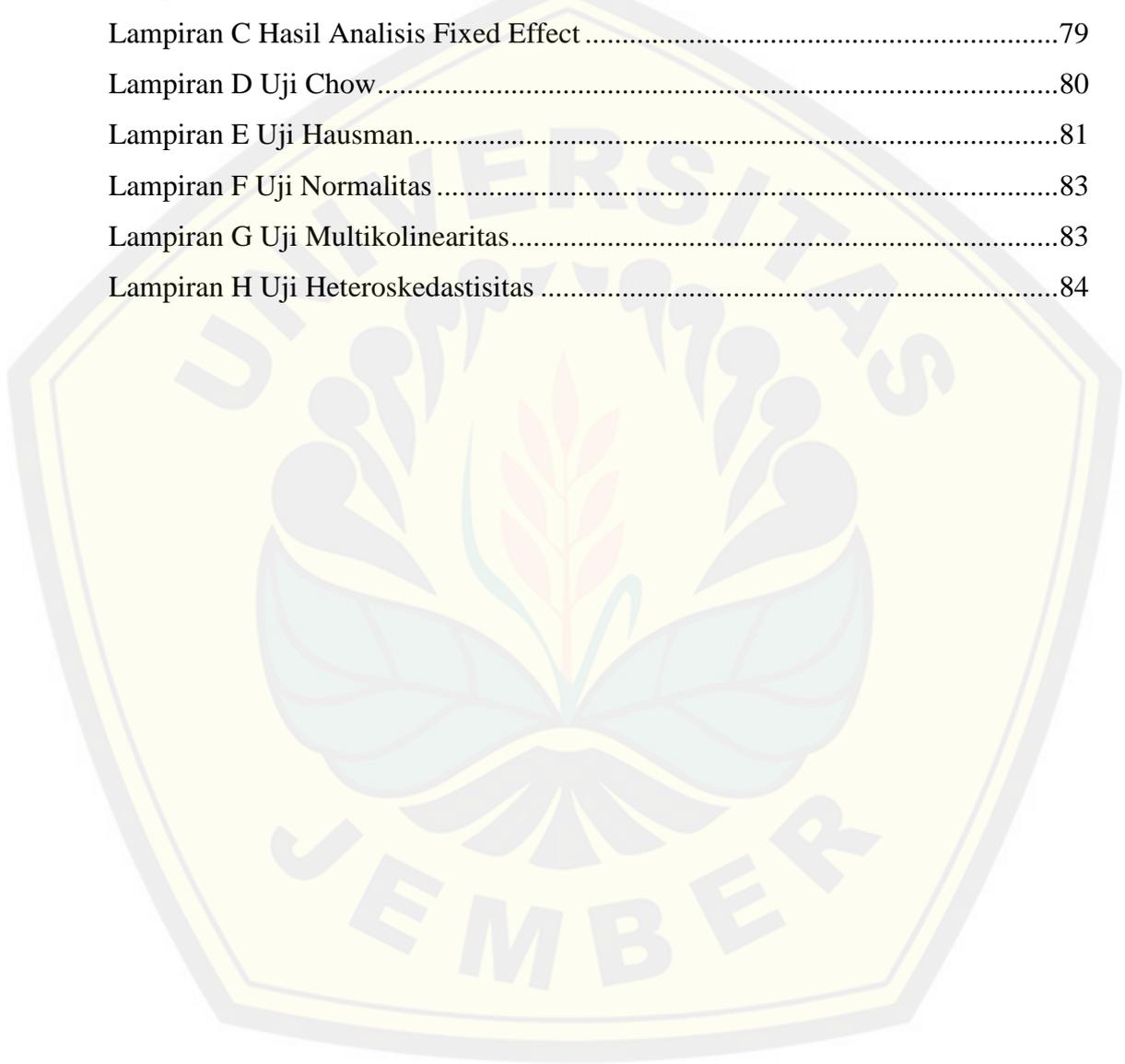
	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/ Kota Jawa Timur Tahun 2010 - 2016	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Demografi Kawasa Gerbangkertosusila Tahun 2017	46
Tabel 4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2017.....	49
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	54
Tabel 4.5 Hasil Analisis Data Panel dengan Menggunakan Pendekatan FEM.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Adjusted R-squared	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Jarque-Berra Test.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 PDRB Kabupaten/ Kota Jawa Timur dalam Jutaan rupiah Tahun 2010 -2016	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Peta Administratif Gerbangkertosusila	46
Gambar 4.2 Kontribusi PDRB Gerbangkertosusila Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	48
Gambar 4.3 Wilayah Administratif Kabupaten Gresik.....	49
Gambar 4.4 Wilayah Administratif Kabupaten Bangkalan	50
Gambar 4.5 Wilayah Administratif Kabupaten Mojokerto.....	50
Gambar 4.6 Wilayah Administratif Kota Mojokerto	51
Gambar 4.7 Wilayah Administratif Kota Surabaya	51
Gambar 4.8 Wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo	52
Gambar 4.9 Wilayah administratif Kabupaten Lamongan	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Rekap Data DAU,DAK, DBH dan PDRB Tahun 2003-2017.....	73
Lampiran B Hasil Analisis Common Effect	78
Lampiran C Hasil Analisis Fixed Effect	79
Lampiran D Uji Chow.....	80
Lampiran E Uji Hausman.....	81
Lampiran F Uji Normalitas	83
Lampiran G Uji Multikolinearitas.....	83
Lampiran H Uji Heteroskedastisitas	84





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat untuk mensejahterakan, adil dan makmur. Sehubungan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia sangat membutuhkan pembangunan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dan sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi maka diperlukan pembangunan sumber daya manusia untuk mengunggulkan tingkat produktifitas dan juga mengurangi angka kemiskinan di negara Indonesia yang sedang berkembang.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2015:198).

Pembangunan ekonomi daerah, proses majunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB dan APBD. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Menurut Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia.

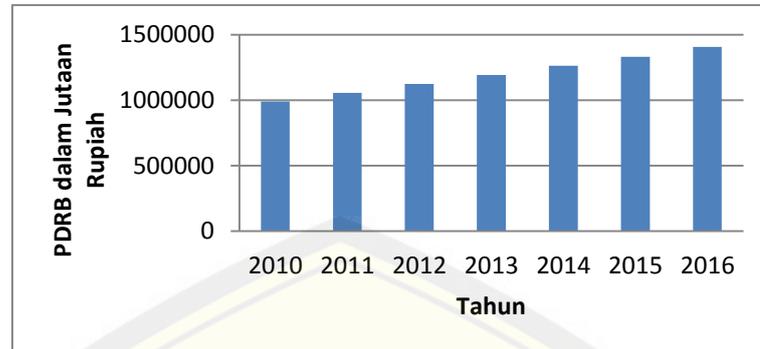
Spesifiknya, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada skala nasional, besaran nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), baik pendapatan negara dan hibah, serta belanja negara memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Kenaikan anggaran tersebut merupakan indikator tumbuhnya perekonomian Indonesia secara garis besar. Peningkatan anggaran pemerintah tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat melalui APBN-nya, namun juga pada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kenaikan anggaran pada APBD tingkat kabupaten di Indonesia bukan hanya menjadi indikator kemajuan perekonomian daerah, namun juga indikator bahwa kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah semakin baik.

Otonomi daerah juga merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek

pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain. UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa DAU, DAK dan DBH digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dengan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Detailnya, di luar dari ketiga fungsi tersebut penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi penting karena akan saling mempengaruhi suatu daerah ke daerah yang lainnya, karena penentuan pusat pertumbuhan sangatlah menentukan perkembangan di wilayah. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat tercermin secara garis besar tercermin dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pencapaiannya akan terkait dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai besaran dana perimbangan, untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan evaluasi terkait dana perimbangan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 1.1 PDRB Jawa Timur dalam Jutaan rupiah tahun 2010 – 2016 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018).

Hal ini menunjukkan kinerja rata-rata Jawa Timur berkembang lebih pesat dari rata-rata provinsi lain. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tentunya untuk Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gerbangkertosusila dan sekitarnya yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan juga berpengaruh dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004:156) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Peningkatan serta tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat dari perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang dispesifikasikan kepada SWP Gerbangkertosusila.

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan pembangunan adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto di suatu wilayah/daerah. Pembangunan yang merata maka akan diikuti dengan pendapatan yang meningkat baik barang dan jasa yang di produksi. Hal ini dikarenakan Produk Domestik Bruto merupakan

suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi di suatu daerah. PDRB merupakan Jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu mempertimbangkan kepemilikan (Sutarno, 2013:164).

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010 - 2016

Kab/Kota	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pacitan	6.817,4	7.246,2	7.705	8.157,6	8.582,2	9.019,54	9.489,69
Ponorogo	8.961,5	9.472,2	10.038,4	10.554,5	11.104,5	11.687,87	12.305,65
Trenggalek	7.962,1	8.435,2	8.959,5	9.496,7	9.998,5	10.501,58	11.026,55
Tulungagung	16.776,3	17.845,2	18.999	20.164,3	21.265,2	22.326,62	23.446,44
Blitar	16.213,9	17.093,9	18.054,5	18.967,3	19.920,2	20.928,47	21.991,43
Kediri	18.254,5	19.354,9	20.538,3	21.733,5	22.89	24.007,72	25.211,9
Malang	41.342,9	44.091,3	47.076	49.571,7	52.550,4	55.317,82	58.247,34
Jumajang	14.260,1	15.144,4	16.053,4	16.949,6	17.851,9	18.676,95	19.555,17
Jember	33.375,5	35.208,2	37.262	39.519,2	41.971,7	44.222,56	46.533,56
Banyuwangi	32.463,8	34.720,4	37.235,7	39.733,6	42.005,7	44.529,93	46.924,58
Bondowoso	8.515,9	9.033	9.583,4	10.140,1	10.652,4	11.179,62	11.735,59
Situbondo	8.471,4	8.927,1	9.411,6	9993,8	10.572,4	11086,48	11.640,76
Probolinggo	15.028,1	15.912,5	16.936,8	17.808,9	18.682,2	19570,99	20.504,09
Pasuruan	61.178,3	65.271,6	70.167,1	75.044	80.105,4	84415,72	89.011,18
Sidoarjo	81.472,7	87.212,4	93.543,9	99.992,5	106.434,3	112.012,86	118.179,19
Mojokerto	34.147,1	36.405,8	39.047,3	41.608,4	44.292	46.792,33	49.360,59
Jombang	17.350,8	18.385	19.514,8	20.672,3	21.793,2	22.960,25	24.199,07
Nganjuk	11.405,4	12.061,2	12.767	13.456	14.142,9	14.875,35	15.661,81
Madiun	8.119,7	8.608,7	9.135,7	9.654,1	10.169,7	10.704,87	11.268,9
Magetan	8.277,8	8.744,8	9.251,2	9.792,6	10.291,7	10.823,92	11.398,13
Ngawi	8.456,7	8.973,3	9.568,2	10.094	10.681	11.223,12	11.807,56
Bojonegoro	33.291,9	36.751	38.136,1	39.039,4	39.934,8	46.892,81	57.187,37
Tuban	28.017,9	29.934,3	31.816,3	33.678,8	35.519,9	37.256,03	39.081,76
Lamongan	16.275,2	17.360,5	18.562,7	19.848,8	21.099,9	22.316,88	23.623,79
Gresik	59.068,6	62.898,7	67.248,8	71.314,2	76.336	81.380,44	85.850,11
Bangkalan	15.881,4	16.406,5	16.173,7	16.204	17.369,2	16.906,84	17.018,65
Sampang	10.064	10.315,3	10.910,9	11.623,8	11.632,9	11.874,48	12.606,81
Pamekasan	6.994,2	7.429,4	7.894	8.375,2	8.846,2	9.316,86	9.815,77
Sumenep	15.136,5	16.064,8	17.665	20.218,1	21.476,9	21.750,58	22.311,69
Kota Kediri	57.550,6	60.020,1	63.185,1	65.408,8	69.232,9	72.945,53	76.988,36
Kota Blitar	2.855	3.038,4	3.236,6	3.446,8	3.649,6	3.856,91	4.079,26
Kota Malang	31.377,3	33.273,7	35.355,7	37.547,7	39.724,7	41.952,13	44.303,9
Kota Probolinggo	4.921,3	5.213,9	5.552,1	5.911,3	6.261,9	6.628,75	7.018,29
Kota Pasuruan	3.585,4	3.810,7	4.051,2	4.315,1	4.561,3	4.813,31	5.076,35
Kota Mojokerto	2.987,2	3.165,6	3.358,4	3.566,7	3.774,6	3.991,37	4.221,83
Kota Madiun	6.081,2	6.494,4	6.937,7	7.470,7	7.965,3	8.455,44	8.954,7
Kota Surabaya	231.204,7	247.686,6	265.892,1	286.050,7	305.947,6	324.215,17	343.652,6
Kota Batu	6.504,4	6.968	7.473,6	8.018,6	8.572,1	9.145,95	9.750,91
Total 38 Kab/Kota	990.648,8	1.054.978,8	1.124.298,8	1.195.143,5	1.267.863,3	1.340.564,05	1.421.041,33
Jawa Timur	990.648,8	1.054.401,8	1.124.464,6	1.192.789,8	1.262.684,5	1.331.376,1	1.405.561,04

Sumber : BPS Jawa Timur 2010 – 2016.

PDRB di Jawa Timur untuk wilayah SWP Gerbangkertosusila yang mencakup Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan yang berpusat di Kota Surabaya terjadi peningkatan dari tahun 2010 - 2016, dimana untuk Kabupaten Gresik dari Rp 59.068,6 milyar meningkat mencapai Rp 85.850,11 milyar, Kabupaten Bangkalan dari Rp 15.881,4 milyar meningkat mencapai Rp 17.081,65 milyar, lalu untuk Kabupaten Mojokerto Rp 34.147,1 milyar meningkat mencapai Rp 49.360,59 milyar, Kota Mojokerto dari Rp 2.987,2 milyar meningkat mencapai Rp 4.221,83 milyar, Kota Surabaya dari Rp 231.204,7 milyar meningkat mencapai Rp 343.652,6 milyar, Kabupaten Sidoarjo dari Rp 81.472,7 milyar meningkat mencapai Rp 118.179,19 milyar dan Kabupaten Lamongan dari Rp 16.272,2 milyar meningkat mencapai Rp 23.623,79 milyar.

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Periode dari keseluruhan objek yang akan diteliti adalah tahunan dengan panel data mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2017 di daerah SWP Gerbangkertosusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan peraturan presiden terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011 - 2031 yang menyatakan bahwa adanya pembagian wilayah atau Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) agar dapat memudahkan kinerja dalam pengembangan wilayah guna menyokong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Data rata-rata PDRB pada SWP Gerbangkertosusila mengalami peningkatan yang signifikan hal ini yang mampu mendukung dan menyokong Jawa Timur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan RTRW Jawa Timur pada khususnya. Penulis berharap dengan melakukan penelitian atas dana perimbangan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah di daerah SWP Gerbangkertosusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan selama lima belas tahun terakhir, akan diperoleh

gambaran yang jelas mengenai efektivitas dana perimbangan dalam menstimulasi atau mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian tujuan desentralisasi fiskal.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya?
- b. Bagaimana Pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya?
- c. Bagaimana Pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak terkait sehingga memiliki manfaat yaitu :

- a. Bagi Akademis

Sebagai tambahan pengetahuan bagaimana pengaruh Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya dan aplikasi terhadap teori yang diperoleh

peneliti dengan fenomena ekonomi yang sebenarnya. Serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya, dan juga dapat dijadikan masukan guna memberikan kebijakan yang tepat sasaran.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2001:118) masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat system produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: Sumber alam yang tersedia, sumber manusia, dan stok barang kapital yang ada. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi.

Teori ini juga menjelaskan di dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya. Perlu dicatat bahwa akumulasi modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber-sumber yang ada. Artinya bahwa orang yang mampu menabung pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang menguasai dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi, yaitu para pengusaha dan tuan tanah. Pekerja merupakan satu-satunya pelaku ekonomi yang tidak memiliki kemampuan menabung karena mereka tidak mampu menguasai dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang ada.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Pertumbuhan ekonomi menurut Neo Klasik dalam Arsyad (2015:163) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan Neo Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh *Charles Cobb* dan *Paul Douglas* yang sekarang dikenal dengan sebutan *fungsi produksi Cobb-Douglas*.

Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut :

$$Q_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Dimana :

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

α = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

β = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai T_t , α dan β bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai α dan β ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa $\alpha + \beta = 1$, yang berarti bahwa α dan β nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai α dan β ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

c. Teori Pertumbuhan (Solow-Swan)

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Bentuk fungsi produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah:

$$Q = f(K, L); K, L > 0$$

Pada persamaan di atas Q adalah output bersih sesudah depresiasi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia. Pada tahap selanjutnya Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai Negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru ini maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi:

$$Y = f(K, L \times E)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut dengan efisiensi tenaga kerja, sedangkan $L \times E$ menunjukkan jumlah

tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ($L \times E$).

d. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow (1997) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- 1) Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.
- 2) Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).
- 3) Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- 4) Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- 5) Masyarakat berkonsumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

Banyak ahli ekonomi telah mendefinisikan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah Sukirno (2008:81) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Pada konteks regional, yaitu dengan memasukkan unsur lokasi/wilayah dalam pembahasannya, pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Indikator pertumbuhan ekonomi nasional

suatu negara yang lazim dipakai adalah Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Sementara indikator pertumbuhan ekonomi daerah atau regional dari suatu negara adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai cermin dari pendapatan regional.

PDRB dapat dihitung menggunakan 2 metode yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah pendekatan yang menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi pada satu wilayah pada tahun tertentu dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah pendekatan yang menghitung besaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi seluruh unit ekonomi pada tahun tertentu dengan menggunakan harga pada tahun yang dijadikan sebagai tahun dasar. Untuk penelitian ini, kami menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi yang terjadi di suatu daerah.

e. Teori Pertumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru menganalisis tentang pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari system ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh akan hanya modal fisik saja melainkan modal manusia. Akumulasi modal juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw 2006:158).

Teori ini mengasumsikan juga bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal dan memacu peningkatan produktivitas (Todaro,2000:95). Dengan kata lain peranan pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan modal manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam teori pertumbuhan baru ini terdapat persamaan sederhana yaitu (Utama, 2015):

$$Y = AK$$

Dalam rumus ini A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi sedangkan K melembangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam rumusan ini ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro, 2000:95). Realitanya dengan melakukan investasi dalam bidang pendidikan akan dapat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga semakin meningkat dan akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Saputra,2011:117).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang di produksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah.

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui prosentasi perkembangan pendapatan riil. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produk barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produk barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produk sektor jasa dan pertumbuhan produk dalam modal (Sukirno, 2011:73).

Profesor Kuznet menyatakan salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita (Todaro,2000:126). Pertumbuhan ekonomi perkapita yang dimaksud adalah PDRB, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita dan merubah

pola konsumsi dalam hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Produk domestik regional bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, sedangkan yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi atau output yang dihasilkan dan dikurangi biaya antara (Tarigan,2005:109). Produk domestik regional bruto yang dihasilkan di setiap daerah besar nya berbeda-beda, hal ini tergantung oleh potensi atau faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan juga kemampuan daerah untuk mengelola potensi atau faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan juga kemampuan daerah untuk mengelola potensi atau faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Cara perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (BPS,2012) :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (katagori) :

- 1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalihan
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik, Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Komunikasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estat

- 13) Jasa perusahaan
- 14) Administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial wajib
- 15) Jasa-jasa Pendidikan
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- 17) Jasa lainnya.

b. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) Pengeluaran konsumsi dan rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap dosmetik bruto
- 4) Perubahan inventori
- 5) Ekspor *netto*

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; ssemuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto di susun dalam dua bentuk yaitu :

- 1) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan merupakan jumlah nilai produksi pengeluaran atau pendapatan yang di hitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinsikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto Rillnya.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berkaju menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perkeonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi

dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atau ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Dalam UU No.33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang Republik No. 33 tahun 2004 menimbang bahwa pembangunan nasional yang dilakukan merupakan upaya pembangunan yang bereksinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Adisamita (2011:189) Tujuan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai Undang-Undang No. 29 / 1999 adalah upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan ini merupakan mengubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, agama, fiskal, moneter, dan kewenangan lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (RPJMN, 2005).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal ini maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik diharapkan menjadi sederhana dan cepat dikarenakan dilakukan oleh pemerintah terdekat sesuai kewenangan yang ada.

Tujuan pokok dilakukannya desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang No 25 tahun 1999 (Adisasmita, 2011:189) yaitu :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akutanbel) dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah bersangkutan.
- d. Menjadi aman dalam alokasi penerimaan negara bagi negara.
- e. Mempertegas sistem pertanggung jawaban pemerintah daerah.
- f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan umum pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto

yang ditetapkan dalam APBN. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah”.

Pusat dan daerah menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam proses rencana pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, DAK, dan DBH, sedangkan porsi PAD masih relative kecil (Mardiasmo,2004:117).

Mardiasmo (2004:157),mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat dalam memberikan dana bantuan berbentuk grant kepada pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equit*)
- 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif.Pajak daerah cenderung kurang progresif, membenani tariff pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
- 4) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Dengan demikian DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan Dana alokasi umum adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskalkeuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Pada umumnya ada dua jenis grant yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yaitu: (1) *block grant* (DAU) dan (2) *specific grant* (DAK). Dalam rangka meningkatkan local discretion, grant yang diberikan oleh

pemerintah pusat lebih banyak bersifat block grant, bukan specific grant. Dana alokasi umum bersifat “block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menghitung dana alokasi umum suatu daerah ada beberapa ketentuan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 1) DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh kota.

Dalam penyusunannya, rumus dana alokasi umum mengacu pada beberapa prinsip dasar agar rumus yang dipakai memenuhi beberapa aspek, seperti aspek legalitas hukum, aspek akademis dan aspek implementasi di lapangan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Norma hukum dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR menjadi dasar implementasi dana perimbangan. Dalam pembuatan rumus dana alokasi umum harus memenuhi kaidah-kaidah dasar yang telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 33 Tahun 2004. Salah satu kaidah yang terpenting adalah bahwa dana alokasi umum dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan bobot daerah. Sementara itu bobot daerah itu harus dirumuskan dengan menggunakan suatu formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah.
- 2) Hubungan antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas. Daerah yang relatif lebih maju dan mampu berdiri sendiri bila dibandingkan dengan daerah lain, maka daerah tersebut akan memerlukan bantuan dari pusat relatif lebih kecil.

Daerah yang lebih maju pada umumnya mempunyai pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam) yang relatif lebih besar. Oleh karena itu, dalam perumusannya formula dana alokasi umum disepakati bahwa daerah yang akan memperoleh dana alokasi umum adalah daerah yang memerlukan pembiayaan kebutuhan daerah, tetapi tidak mampu membiayai selesih antara kebutuhan daerah dengan potensinya.

- 3) Rumus untuk menentukan alokasi dana alokasi umum harus mudah dipahami dan logis. Rumus dana alokasi umum didasarkan atas formula yang sederhana, mudah dipahami dan juga mudah dihitung oleh daerah bila data tersedia. Selain itu rumus tersebut harus logis. Artinya memenuhi kaidah-kaidah prinsip teori maupun UU No. 33 Tahun 2004, serta tidak mempertentangkan prinsip yang satu dengan yang lain (konsisten).
- 4) Rumus didasarkan atas variabel-variabel yang datanya tersedia akurat. Formula alokasi dana alokasi umum harus memiliki variabel-variabel yang datanya terdapat di setiap daerah dan selain itu data tersebut berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Menurut Widjaja (2005:75), DAK adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus yaitu :

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau

- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dialokasikan berdasarkan usulan daerah. Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

Menurut website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK secara spesifik bertujuan:

- 1) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- 2) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- 3) Mendorong peningkatan produktifitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 4) Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam suatu kesatuan system yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
- 5) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.

- 6) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintah.
- 7) Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan-kegiatan investasi dalam pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang lebih panjang, termasuk pengadaan sarana fisik pendukung. Dengan adanya pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pengalokasian dana alokasi khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran dana alokasi khusus tidak dapat dipastikan setiap tahun. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan prasarana dan fisik dengan unsur ekonomis yang panjang. Keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas yang tidak melebihi 3 tahun. Persyaratan untuk memperoleh dana alokasi khusus yaitu sebagai berikut:

- 1) Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah
- 2) Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK Reboisasi)
- 3) Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi terkait.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Mardiasmo (2004:205) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal menjelaskan, Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari:

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan Umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan gas bumi
- 5) Pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil (revenue sharing) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota baik berupa pajak, antara lain; PPN, PPh Pasal 25/29 Badan, dan jenis pajak lainnya, maupun

dari sumber daya alam, yang secara umum masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada APBN. Dalam hal yang sama, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menegaskan, salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sampai saat ini secara formal dimiliki sepenuhnya oleh pusat. Dalam jangka panjang, diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan yang dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditi/jasa yang dipungut PPN-nya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya.

d. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat. Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Alternatif untuk memperoleh ini yaitu dilakukan pinjaman pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah (Darise 2009:112).

e. Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda restribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan data bergulir (Halim 2012:104). Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lainlain PAD yang sah, seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang perlu dilakukan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki fungsi dan tujuan masing-masing yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat dan ditentukan. Kegiatan pembangunan nasional berkaitan erat dengan peran serta pemerintah dalam mengatur daerahnya masing-masing. Otonomi daerah yang dibentuk dan dijadikan dasar mengatur daerahnya masing-masing. Indonesia memiliki 38 Kabupaten/Kota dari 38 Kabupaten atau kota tersebut dibagi menjadi 8 SWP sesuai dengan pasal 18 Rencana Sistem Pusat Pelayanan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RTRW Provinsi tahun 2011 – 2031. Salah satu dari SWP itu adalah SWP Gerbangkertosusila yang berpusat di Kota Surabaya. Kontribusi SWP Gerbangkertosusila jika dilihat dari rata-rata PDRB yang diterima merupakan daerah yang dapat mendorong dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, dan DBH serta Pertumbuhan Ekonomi, Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan umum pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan

dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah”. Menurut Widjaja (2005:75), DAK adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus yaitu :

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dialokasikan berdasarkan usulan daerah. Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

Sedangkan DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik ketika dalam daerah tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan tiga kondisi yang dia dikatakan erat kaitannya yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Di era yang modern saat ini kota-kota besar telah menggunakan teknologi-teknologi yang mampu mendorong kinerja produksi semakin tinggi sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa lebih dari sebelumnya. Sistem keuangan dan penyaluran dana guna pembangunan daerah tersebut harus berjalan beriringan dan terkoordinir dengan baik hal ini guna menunjang pelaksanaan dan sinkronisasi antara pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga melibatkan segala faktor ekonomi yang ada. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
1	Anis Setiyawati (2007)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur	PAD, DAU, DAK, Belanja Pembangunan, Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi.	Statistik Deskriptif Dan Regresi Linier Berganda	Hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap

					pengangguran sebesar 8,6%.
2	Windha Amigha Permanasari (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)	DAU, DAK, PAD, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dengan model regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Arbie Gugus Wandira	Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap	DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal	Regresi linier berganda dengan uji t,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja

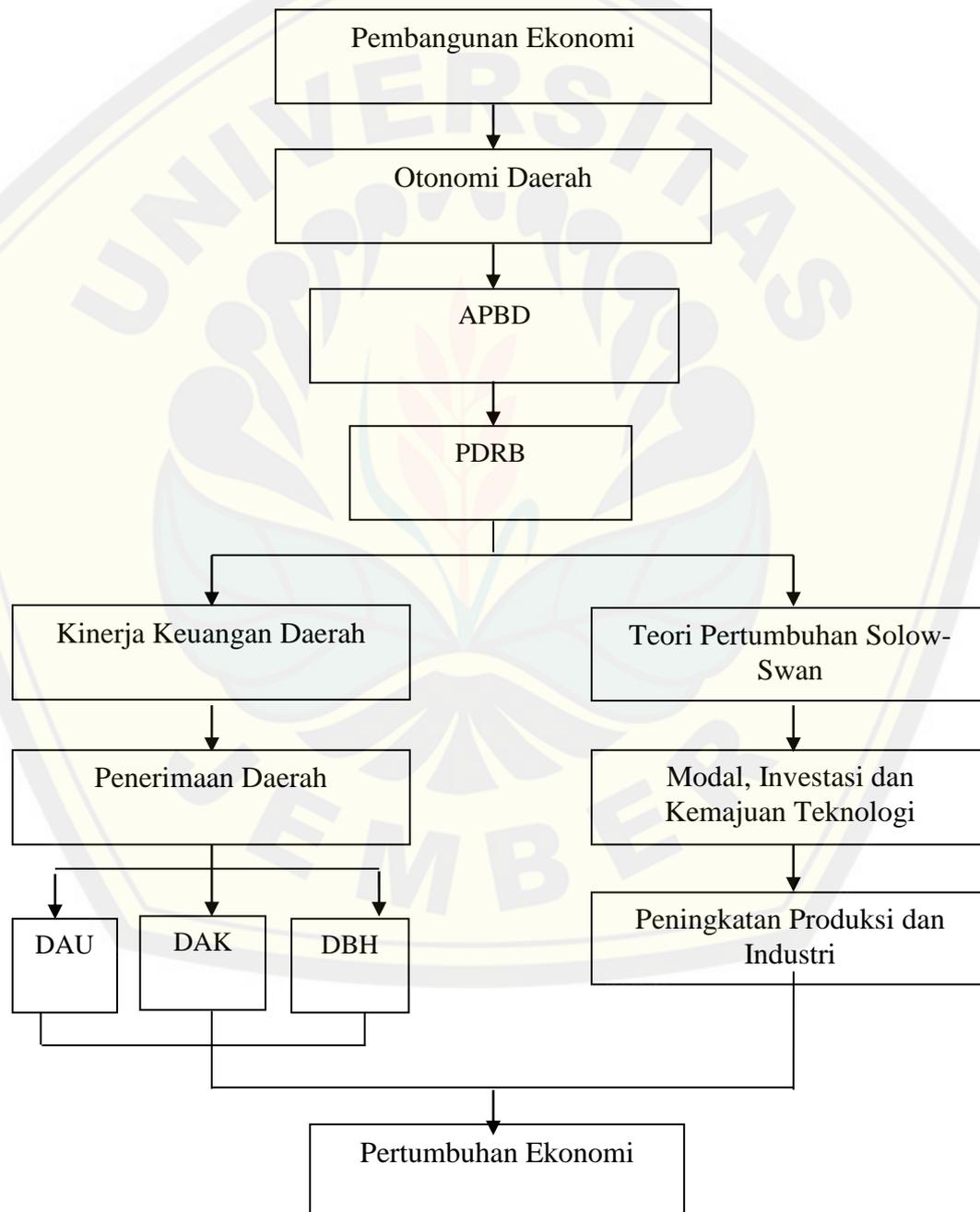
	(2013)	Pengalokasian Belanja Modal		uji F, dan koefisien determinasi	modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
4	Zulfa eliza, Said Muhammad, Muhammad Nasir (2014)	Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh	Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH), dan PDRB	Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda metode analisis data panel dengan empat variabel	Secara umum, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB (hasil estimasi tidak signifikan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
5	Meilita Lukitasari Anwar, Sutomo Wim	Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan	DAU, DAK, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi	Analisis jalur/ <i>Path analysis</i> dengan model regresi linier	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap

	Palar, Jacline I. Sumual (2016)	Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001 – 2013)		berganda dengan menggunakan program SPSS	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan
6	Jannah, Muhamma d Nasir (2018)	Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	PAD, DAK, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda menggunakan model data <i>panel</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena Nilai probabilitas atau tingkat estimasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,4685. nilai tersebut lebih besar dari nilai <i>critical value</i> yaitu 0,10 sehingga tidak signifikan secara statistik, namun signifikan secara teori karena PAD bernilai positif. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

				<p>pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dalam hal ini pengaruhnya adalah negatif. Hasil ini tidak sesuai dengan (DAK) berpengaruh signifikan terhadap PE dengan standar signifikan 0.10 namun variabel DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini disebabkan oleh hubungan antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi tidak seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini di buat untuk memudahkan peneliti dalam melakukan suatu pengamatan atau penelitian. Kerangka konseptual mengenai pertumbuhan ekonomi yang pastinya diharapkan oleh seluruh daerah. Pertumbuhan ekonomi inilah yang nantinya dapat menjadi tolok ukur bagaimana negara tersebut dapat berkembang dengan baik atau buruk. Berikut adalah gambaran dari kerangka konseptual secara keseluruhan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 yaitu kerangka konseptual yang akan memudahkan kita dalam memahami bagaimana alur pembangunan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik. Pembangunan ekonomi adalah suatu hal yang penting, yang akan berpengaruh terhadap Negara atau daerah dapat berkembang dengan baik atau tidak. Pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia dapat didukung oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terdapat empat variable dalam penelitian ini yakni DAU, DAK, DBH dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka konseptual yang ada dijelaskan dipenelitian ini berfokus pada pengaruh yang ada pada DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di SWP Gerbangkertosusilo dan sekitarnya.

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah tidak lepas dari otonomi daerah yang telah dibuat untuk tujuan mensejahterakan masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Otonomi yang ada digunakan untuk mengatur jalannya sebuah tatanan daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah bersumber dari DAU, DAK, dan DBH untuk menyokong pertumbuhan APBD yang berpengaruh terhadap PDRB pada setiap daerah. PDRB yang semakin meningkat akan mampu mendorong kinerja perekonomian dan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang ada di SWP Gerbangkertosusila ini dapat dikembangkan dengan teori Adam Smith tentang masyarakat modern yang berfokus pada pembagian kerja dan pengelolaan sumber daya yang akan bermuara pada pertumbuhan PDRB suatu daerah. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis didapatkan berdasarkan atas teori dan penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiah). Menurut Soewadji (2012:19) Tujuan dari penelitian Deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Wirat Maja (2014:47) mengatakan jenis penelitian kuantitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistic atau cara lain dari ini adalah gabungan antara data subjek dan data dokumenter (*Documentary Data*).

3.1.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) SWP Gerbangkertosusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten sidoarjo dan Kabupaten Lamongan khususnya data tahun 2003 hingga tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi DAU, DAK, DBH dan Pertumbuhan Ekonomi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel yaitu data yang merupakan dari data *time series* dan *cross section*. Data time series pada periode tahun 2003 – 2017, sedangkan data cross section adalah 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten

Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan.

3.1.3 Unit Analisis.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana ada 7 kabupaten dan kota yang dijadikan obyek yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi adalah faktor pendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Data Panel

Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Dengan kata lain data panel adalah data yang diperoleh dari cross section yang diobservasi berulang pada unit individu yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan demikian akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. Apabila setiap unit cross section memiliki jumlah observasi times series yang sama maka disebut sebagai *balanced panel*. Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka disebut *unbalanced panel*.

Terdapat tiga teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data yaitu (Mirza, 2012:27) :

a. Pendekatan Model Pooled Least Square (*Common Effect*).

Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan Metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini

seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

b. Pendekatan Model Efek Tetap (*Fixed Effect*).

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebuta model efek tetap atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*Cross-Section Weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross – section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepestasi data. Pemilihan model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

c. Pendekatan Model Efek Acak (*Random Effect*).

Model data dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter-parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan ke dalam error. Dengan menggunakan model pendekatan ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap maupun efek acak dapat ditentukan dengan menggunakan uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang

merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

Panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross-section*. Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data *time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan ekonomi
- X₁ = DAU
- X₂ = DAK
- X₃ = DBH
- β₀ = Konstanta (besarnya Y apabila X₁, X₂ dianggap konstan)
- β₁ = Koefisiensi Regresi DAU
- β₂ = Koefisiensi Regresi DAK
- β₃ = Koefisien Regresi DBH
- e = Variabel pengganggu
- I = kabupaten/kota di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya
- T = waktu (tahun)

Regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan adanya kesulitan dalam spesifikasi model. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu *residual time series*, *cross section* maupun gabungan keduanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan panel

data. Penaksiran model data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it}$$

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

3.2.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (Uji-F), uji parsial (Uji-t) dan koefisien determinasi berganda (adjusted R-square).

a. Uji F (Pengujian Secara Bersama-sama)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - 1)}$$

Dimana :

R^2 = Koefesien Determinasi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- 1) $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pkonomi.
- 2) $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kriteria Pengujian :

- 1) Jika nilai F hitung \leq nilai F Tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika nilai F hitung $>$ nilai F Tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah uji variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

$$t_{hitung} = \frac{b}{sb}$$

Dimana :

b_1 = Koefesien Regresi

Sb_1 = Standard Error

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

- 1) $H_0 = b_1 = 0$, artinya variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) $H_a = b_1 \neq 0$, artinya variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- 1) $H_0 = b_2 = 0$, artinya variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) $H_a = b_2 \neq 0$, artinya variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

- 1) $H_0 = b_3 = 0$, artinya variabel DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) $H_a = b_3 \neq 0$, artinya variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0.05), di mana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika probabilitas t hitung $> \alpha$ (0.05), di mana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- c. Koefisien Determinasi (adjusted R-square)

Adjusted R^2 adalah uji statistik yang melihat seberapa besar total variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Disini adjusted R-square lebih untung digunakan dalam penelitian dikarenakan dalam uji R-square variabel keseluruhan yang diuji.

$$\text{adjusted R-square} = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

- adjusted R^2 = Koefisien Determinasi
 ESS = Jumlah Kuadrat yang Dijelaskan
 TSS = Jumlah Kuadrat Total

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksiran. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksikan apabila sudah lolos dari uji asumsi klasik yang mendasarinya. Karena uji asumsi klasik terdapat metode *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimators*), maka dalam uji ini merupakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Ada rules of thumb bahwa suatu model mengandung masalah multikolinieritas apabila model tersebut memiliki R^2 tinggi (misal diatas 0,8), tetapi tingkat signifikan variabel-

variabel penjelas berdasarkan uji t statistik sangat sedikit. Cara paling mudah untuk mengatasi masalah multikolinieritas adalah menghilangkan/men-drop satu atau beberapa variabel yang memiliki korelasi tinggi dalam model regresi, cara lain bisa dengan menambah data penelitian, cara ini bermanfaat jika masalah multikolinieritas akibat kesalahan sampel (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:198)

b. Uji Heterokedastisitas

Terjadi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data cross section dari pada data time series. Hal ini terjadi karena perilaku data time series fluktuasinya dari waktu ke waktu relatif stabil. Konsekuensinya adanya gejala heteroskedastisitas adalah estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum yang berakibat perhitungan standar error metode OLS tidak bisa dipercaya lagi kebenarannya, uji-t dan uji-F tidak bisa dipercaya lagi untuk uji model regresi (Gujarati, 2013:463).

c. Uji Autokolerasi

Istiah uji autokolerasi merupakan korelasi antara seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (cross-section), atau korelasi pada dirinya sendiri (Supranto, 2004:82). Uji asumsi autokolerasi juga bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$. Konsekuensi dari adanya korelasi antara lain adalah:

- 1) Estiamator OLS tidak efisien dan test signifikan menjadi tidak valid lagi.
- 2) Uji t atau uji F menjadi tidak valid, sehingga kesimpulan menjadi bias.
- 3) Estimator OLS akan sensitif terhadap fluktuasi sampling.

Pengujian disini dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* LM. Uji BG-LM digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada first order tetapi bisa juga digunakan pada order lainnya (Gujarati, 2003).

Kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai probabilitas x^2 hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi ditolak.
- 2) Apabila nilai probabilitas x^2 hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima.

d. Uji Normalitas

Kenormalan dari variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji Jarque Berra LM (Gujarati, 1995:143) Variabel pengganggu memiliki distribusi normal, sehingga uji t dan F dapat dilakukan. Namun apabila asumsi normalitas tidak dapat terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan uji t dan F, hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtorik. Kenormalan diuji kebenaran atas keadaan normalitas harus dipenuhi dengan hubungannya dan keabsahannya yang dilakukan Uji t dan Uji F.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional adalah variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya permasalahan atau untuk menghindari terjadinya salah tafsir sehingga di perlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (dalam milyar rupiah).
- b. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (dalam jutaan rupiah).

- c. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus (dalam jutaan rupiah).
- d. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya DBH pajak (DBHP) dan DBH bukan pajak (DBHBP). DBH dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota (dalam jutaan rupiah).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dengan variabel dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Kkusus, dan Dana Bagi Hasil dengan pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel tersebut yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Kkusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif dan konstan terhadap pertumbuhan ekonomi di SWP Gerbangkertosusilo tahun 2003 - 2017.

1. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003-2017.
2. Variabel Dana Alokasi Kkusus berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Kkusus mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003-2017.
3. Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya tahun 2003-2017.

Perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang terus menerus dilakukan akan mengembangkan sketor-sektor perekonomian yang ada di kawasan SWP Gerbangkertosusilo. Sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik jika dikelola dengan bijak oleh masing-masing wilayah atas alokasi dari pemerintah daerah yang telah diberikan guna mengembangkan sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB.

5.2 Saran

Dalam rangka untuk mengatur dan mengelola daerah pengembangan yang baik dan dapat memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, diharapkan pemerintah daerah SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya tetap meningkatkan sektor pelayanan publik. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah di SWP Gerbangkertosusila dan sekitarnya perlu mengelola kembali Dana Alokasi Umum ke arah perbaikan infrastruktur layanan publik yaitu dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana umum agar layak pakai untuk daerah-daerah yang memang memiliki kapasitas penduduk yang cukup tinggi dibarengi dengan kinerja industri sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.
2. Mengelola dan menata penggunaan Dana Alokasi Khusus ke arah kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan terus mendorongnya. Pemerintah Daerah mampu melakukannya dengan cara memperhatikan kembali kebutuhan daerah-daerah yang terpencil dan masih memiliki tingkat perekonomian dibawah rata-rata yang terbilang rendah sehingga pembangunan sarana prasarana mampu mendorong pertumbuhan PDRB daerah tersebut.
3. Terkait dengan Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah yang memegang otonomi daerahnya masing-masing lebih memperhatikan kembali terkait dengan DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam yang berlaku. Pengawasan yang lebih terhadap aset dan wajib pajak agar tidak ada lagi kebocoran yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Sehingga pemerintah daerah mampu memaksimalkan DBH untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. STIE YKPN. Yogyakarta
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2018. PDRB Jawa Timur 2010 – 2016.
- BPKAD. RPJMD Provisini Jawa Timur 2014 – 2019
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media..
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C 2013 *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi ke Lima Buku 1. Jakarta:Salemba Empat
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika* Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi revisi*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan YKPN
- Jacline,I.S., Meilita, L.A.,Sutomo, W. P,. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado tahun 2001 – 2003). *Jurnal ekonomi Pembangunan*. Vol 1 No 3
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Mankiw, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta,
- Mirza, S.D. 2012 Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009, *Jurnal Analisis Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Negri Semarang Vol 3 No.1:16*
- Muhammad ,N.,Zulfa, E.,Said,M.,2014. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol 2 No.4
- Nasir, M.,& Jannah. 2018. Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Povinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2 No. 4
- Peraturan Daerah Jawa Timur No.5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Permanasari. Windha Amigha. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 1 No. 3
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Vol 4 No.2:11
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta
- Prof. Dr. Mardiasmo MBA. 2004. *Otonomi dan menejemen keuangn daerah*. Jakarta: CV. Andi offset,yogyakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo MBA. 2007. *Otonomi dan menejemen keuangn daerah*. Jakarta: CV. Andi offset,yogyakarta.

- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- S, Ginting, K.S, Lubis Irsad, dan Mahali Kasyaful. 2008. Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor–Faktor yang Mempengaruhinya. dalam *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol.4, No.1:15
- Sasana, Hadi,2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol 25. No 1 halaman 26 Januari 2012
- Setyawari, Anis. 2007. Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Pengaruh Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis jalur. *Jurnal Analisis Pembangunan*. Vol.2 No.1
- Singarimbun, dan Effedndi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi 6. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Todaro,M.P.dan dan S.C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke Sebelas Jilid I. Jakarta:Erlangga.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang *Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah*

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Tentang “*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*”. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Utama, Jefri.S, 2015 Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks Karasedinan Besuki), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 5 No.7:36

Wandira. Arbie Gugus. 2013. Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 4. No.2

Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKP

LAMPIRAN

Lampiran A:

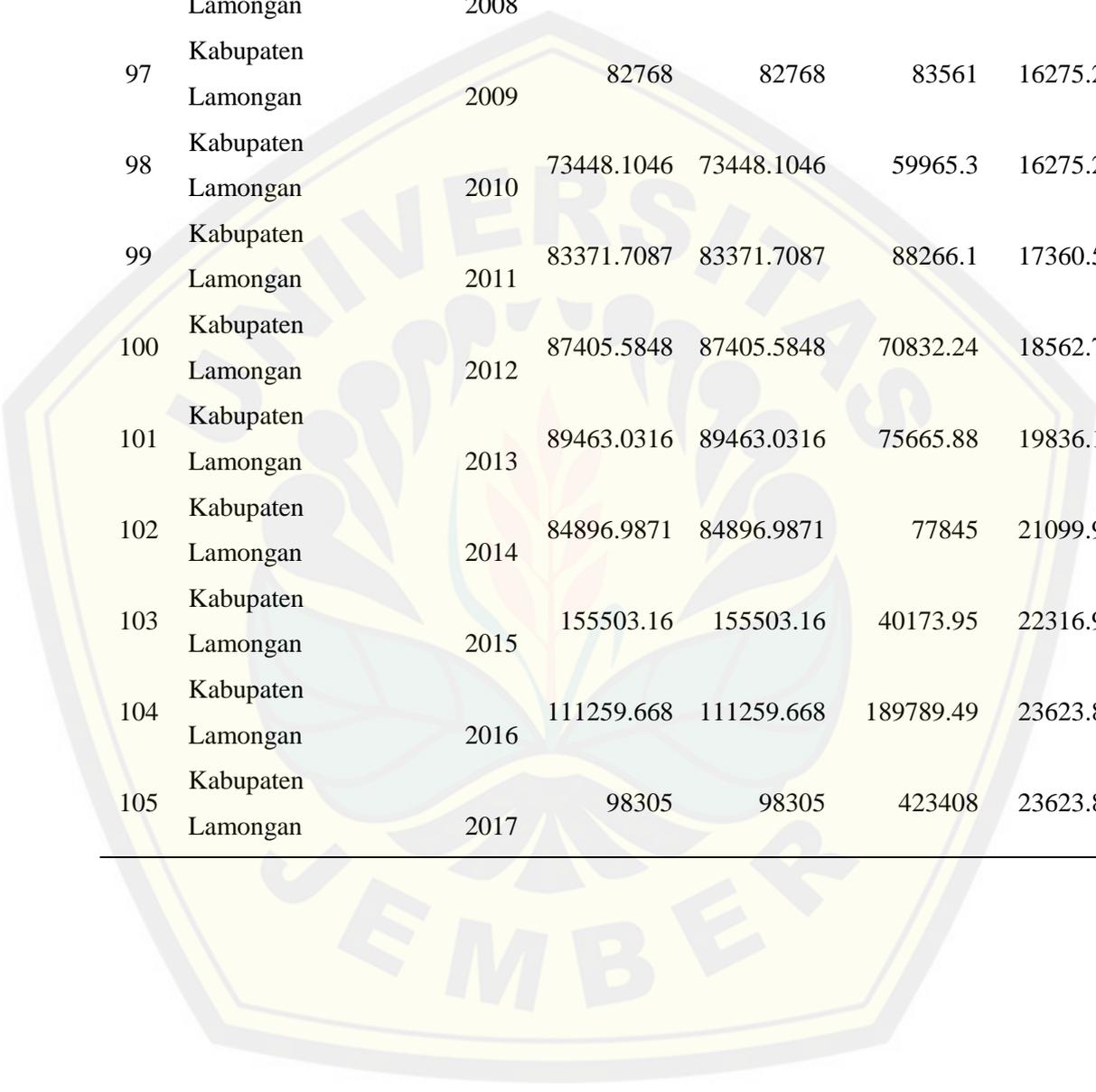
REKAP DATA Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan PDRB Wilayah Gerbangkertosusila tahun 2003 – 2017 (dalam jutaan rupiah).

No	Kabupaten/Kota	Tahun	DAU	DAK	DBH	PDRB
1	Kabupaten Gresik	2003	10584.83	10584.83	5500	56707.5
2	Kabupaten Gresik	2004	38000	38000	5000	56808.6
3	Kabupaten Gresik	2005	46000	46000	12620	56909.7
4	Kabupaten Gresik	2006	56000	56000	26210	57010.7
5	Kabupaten Gresik	2007	74481	74481	9338	58121.8
6	Kabupaten Gresik	2008	103017	103017	22404	58921.9
7	Kabupaten Gresik	2009	126005	126005	62374	59068.6
8	Kabupaten Gresik	2010	148473.574	148473.574	27171.2	59068.6
9	Kabupaten Gresik	2011	126681.736	126681.736	46338.8	62898.7
10	Kabupaten Gresik	2012	90448	90448	82505.06	67248.8
11	Kabupaten Gresik	2013	127753.425	127753.425	49106.18	71304.5
12	Kabupaten Gresik	2014	171387.308	171387.308	72051.26	76336
13	Kabupaten Gresik	2015	214230.769	214230.769	43971.88	81360.4
14	Kabupaten Gresik	2016	173469.042	173469.042	383688.875	85835.1
15	Kabupaten Gresik	2017	184818	184818	320180	85835.1
16	Kabupaten Bangkalan	2003	8801.82	8801.82	7772.09	12817.9
17	Kabupaten Bangkalan	2004	18451.13	18451.13	6330	12919
18	Kabupaten Bangkalan	2005	24214.02	24214.02	12100	13020.1
19	Kabupaten Bangkalan	2006	34308.23	34308.23	29780	13121.1
20	Kabupaten Bangkalan	2007	45301	45301	41518	14232.2
21	Kabupaten Bangkalan	2008	74578	74578	54812	14623.2
22	Kabupaten	2009	80346	80346	68906	15881.4

23	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2010	73333.9912	73333.9912	70109.3	15888.3
24	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2011	83978.4176	83978.4176	88399.5	16406.5
25	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2012	98208.1695	98208.1695	71355.49	16173.7
26	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2013	120989.226	120989.226	105241.4	16204
27	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2014	120567.047	120567.047	98985.48	16804
28	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2015	145651.881	145651.881	103508.52	16906.8
29	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2016	100952.368	100952.368	478548.209	17018.6
30	Bangkalan Kabupaten Bangkalan	2017	92498	92498	354197	17018.6
31	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2003	26419.55	26419.55	3600	31804.6
32	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2004	32200	32200	5000	31905.7
33	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2005	20800	20800	12610	32006.8
34	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2006	24000	24000	21180	32107.8
35	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2007	24000	24000	44985	33218.9
36	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2008	63974	63974	58977	33562.1
37	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2009	73099	73099	64675	34171.1
38	Mojokerto Kabupaten Mojokerto	2010	77412.6631	77412.6631	38706	34171.1

39	Kabupaten Mojokerto	2011	67840.8292	67840.8292	57904.3	36405.8
40	Kabupaten Mojokerto	2012	74329.8497	74329.8497	50645.61	39047.1
41	Kabupaten Mojokerto	2013	63827.7677	63827.7677	52117.7	41579.2
42	Kabupaten Mojokerto	2014	69860.1083	69860.1083	55556.66	44292.6
43	Kabupaten Mojokerto	2015	137842.098	137842.098	23095.25	46792.3
44	Kabupaten Mojokerto	2016	87574.954	87574.954	383948.594	49321.9
45	Kabupaten Mojokerto	2017	77553	77553	332005	23623.8
46	Kota Mojokerto	2003	6332.91	6332.91	3900	1398.6
47	Kota Mojokerto	2004	6332.91	6332.91	9500	1499.7
48	Kota Mojokerto	2005	28789.87	28789.87	23380	1600.8
49	Kota Mojokerto	2006	9477.54	9477.54	20310	1701.8
50	Kota Mojokerto	2007	16623	16623	33667	2812.9
51	Kota Mojokerto	2008	21826	21826	26781	2898.1
52	Kota Mojokerto	2009	22993	22993	26788	2987.2
53	Kota Mojokerto	2010	31214.021	31214.021	15042.4	2997.2
54	Kota Mojokerto	2011	32383.3198	32383.3198	20392	3165.6
55	Kota Mojokerto	2012	35634.5932	35634.5932	15463.9	3358.4
56	Kota Mojokerto	2013	32173.5915	32173.5915	21279.54	3566.4
57	Kota Mojokerto	2014	69860.1083	69860.1083	55556.66	3674.6
58	Kota Mojokerto	2015	106551.154	106551.154	29428.01	3763.1
59	Kota Mojokerto	2016	65908.178	65908.178	148913.697	3759.9
60	Kota Mojokerto	2017	64061	64061	82758	49321.9
61	Kota Surabaya	2003	208946.1	208946.1	24823	219898.2
62	Kota Surabaya	2004	389857.41	389857.41	16274	219999.3
63	Kota Surabaya	2005	313000	313000	22544	220000.1
64	Kota Surabaya	2006	362290.5	362290.5	9550	220201.4

65	Kota Surabaya	2007	386763	386763	80750	221312.5
66	Kota Surabaya	2008	449412	449412	8075	225612.9
67	Kota Surabaya	2009	665214	665214	28534	227470.7
68	Kota Surabaya	2010	991880.806	991880.806	59885.8	231204.7
69	Kota Surabaya	2011	227117.433	227117.433	66499.5	247686.6
70	Kota Surabaya	2012	289460.87	289460.87	53227.56	265892.1
71	Kota Surabaya	2013	295634.74	295634.74	68180.79	286507.2
72	Kota Surabaya	2014	396025.486	396025.486	66182.23	305947.6
73	Kota Surabaya	2015	359411.271	359411.271	42288.1459	324215.2
74	Kota Surabaya	2016	385205.001	385205.001	111064.652	343652.6
75	Kota Surabaya	2017	463766	463766	458989	3759.9
76	Kabupaten Sidoarjo	2003	12521.27	12521.27	6700	72797.8
77	Kabupaten Sidoarjo	2004	72500	72500	5000	72898.9
78	Kabupaten Sidoarjo	2005	80918.34	80918.34	12610	73000
79	Kabupaten Sidoarjo	2006	117488	117488	25970	73101
80	Kabupaten Sidoarjo	2007	153462	153462	89460	74212.1
81	Kabupaten Sidoarjo	2008	191409	191409	8946	74787.3
82	Kabupaten Sidoarjo	2009	217056	217056	45382	74928.8
83	Kabupaten Sidoarjo	2010	223848.093	223848.093	56341.9	81472.7
84	Kabupaten Sidoarjo	2011	180983.544	180983.544	59774.6	87212.4
85	Kabupaten Sidoarjo	2012	144982.244	144982.244	63877.47	93543.9
86	Kabupaten Sidoarjo	2013	151344.775	151344.775	54281.08	99975.7
87	Kabupaten Sidoarjo	2014	142474.403	142474.403	78469.81	106434.3
88	Kabupaten Sidoarjo	2015	208034.753	208034.753	34658.71	112012.9
89	Kabupaten Sidoarjo	2016	208034.753	208034.753	157142.91	118179.2
90	Kabupaten Sidoarjo	2017	155827	155827	470482	118179.2
91	Kabupaten Lamongan	2003	9268.67	9268.67	5700	14312.5
92	Kabupaten Lamongan	2004	17900.21	17900.21	9070	14413.6
93	Kabupaten Lamongan	2005	20372.35	20372.35	10700	14514.7
94	Kabupaten	2006	24549.23	24549.23	39800	14615.7



95	Lamongan Kabupaten Lamongan	2007	40451	40451	59862	15726.8
96	Lamongan Kabupaten Lamongan	2008	54840	54840	75972	15971.9
97	Lamongan Kabupaten Lamongan	2009	82768	82768	83561	16275.2
98	Lamongan Kabupaten Lamongan	2010	73448.1046	73448.1046	59965.3	16275.2
99	Lamongan Kabupaten Lamongan	2011	83371.7087	83371.7087	88266.1	17360.5
100	Lamongan Kabupaten Lamongan	2012	87405.5848	87405.5848	70832.24	18562.7
101	Lamongan Kabupaten Lamongan	2013	89463.0316	89463.0316	75665.88	19836.1
102	Lamongan Kabupaten Lamongan	2014	84896.9871	84896.9871	77845	21099.9
103	Lamongan Kabupaten Lamongan	2015	155503.16	155503.16	40173.95	22316.9
104	Lamongan Kabupaten Lamongan	2016	111259.668	111259.668	189789.49	23623.8
105	Lamongan Kabupaten Lamongan	2017	98305	98305	423408	23623.8

Lampiran B :

COMMON EFFECT

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/04/19 Time: 21:28

Sample: 1 105

Periods included: 7

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4144.977	11214.53	-0.369608	0.7124
X1	0.381002	0.038449	9.909332	0.0000
X2	0.058578	0.021259	2.755484	0.0070
X3	-0.204216	0.059409	-3.437475	0.0009
R-squared	0.612972	Mean dependent var		66853.48
Adjusted R-squared	0.601476	S.D. dependent var		80987.36
S.E. of regression	51126.29	Akaike info criterion		24.55934
Sum squared resid	2.64E+11	Schwarz criterion		24.66044
Log likelihood	-1285.365	Hannan-Quinn criter.		24.60030
F-statistic	53.32106	Durbin-Watson stat		1.436206
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran C:

FIXED EFFECT

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/04/19 Time: 21:28

Sample: 1 105

Periods included: 7

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36831.92	17696.26	2.081339	0.0403
X1	0.380373	0.039826	9.550977	0.0000
X2	0.131251	0.032487	4.040100	0.0001
X3	0.371378	0.101273	3.667088	0.0004

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.944039	Mean dependent var	66853.48
Adjusted R-squared	0.926208	S.D. dependent var	80987.36
S.E. of regression	48171.63	Akaike info criterion	24.55773
Sum squared resid	2.02E+11	Schwarz criterion	25.01270
Log likelihood	-1271.281	Hannan-Quinn criter.	24.74209
F-statistic	12.17399	Durbin-Watson stat	1.721198
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D:

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.912132	(14,87)	0.0357
Cross-section Chi-square	28.168287	14	0.0135

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/04/19 Time: 21:29

Sample: 1 105

Periods included: 7

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4144.977	11214.53	-0.369608	0.7124
X1	0.381002	0.038449	9.909332	0.0000
X2	0.058578	0.021259	2.755484	0.0070
X3	-0.204216	0.059409	-3.437475	0.0009

R-squared	0.612972	Mean dependent var	66853.48
Adjusted R-squared	0.601476	S.D. dependent var	80987.36
S.E. of regression	51126.29	Akaike info criterion	24.55934
Sum squared resid	2.64E+11	Schwarz criterion	24.66044
Log likelihood	-1285.365	Hannan-Quinn criter.	24.60030
F-statistic	53.32106	Durbin-Watson stat	1.436206
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E:

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.938806	3	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.380373	0.381002	0.000274	0.9697
X2	0.131251	0.058578	0.000654	0.0045
X3	-0.371378	-0.204216	0.007123	0.0476

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/04/19 Time: 21:29

Sample: 1 105

Periods included: 7

Cross-sections included: 15

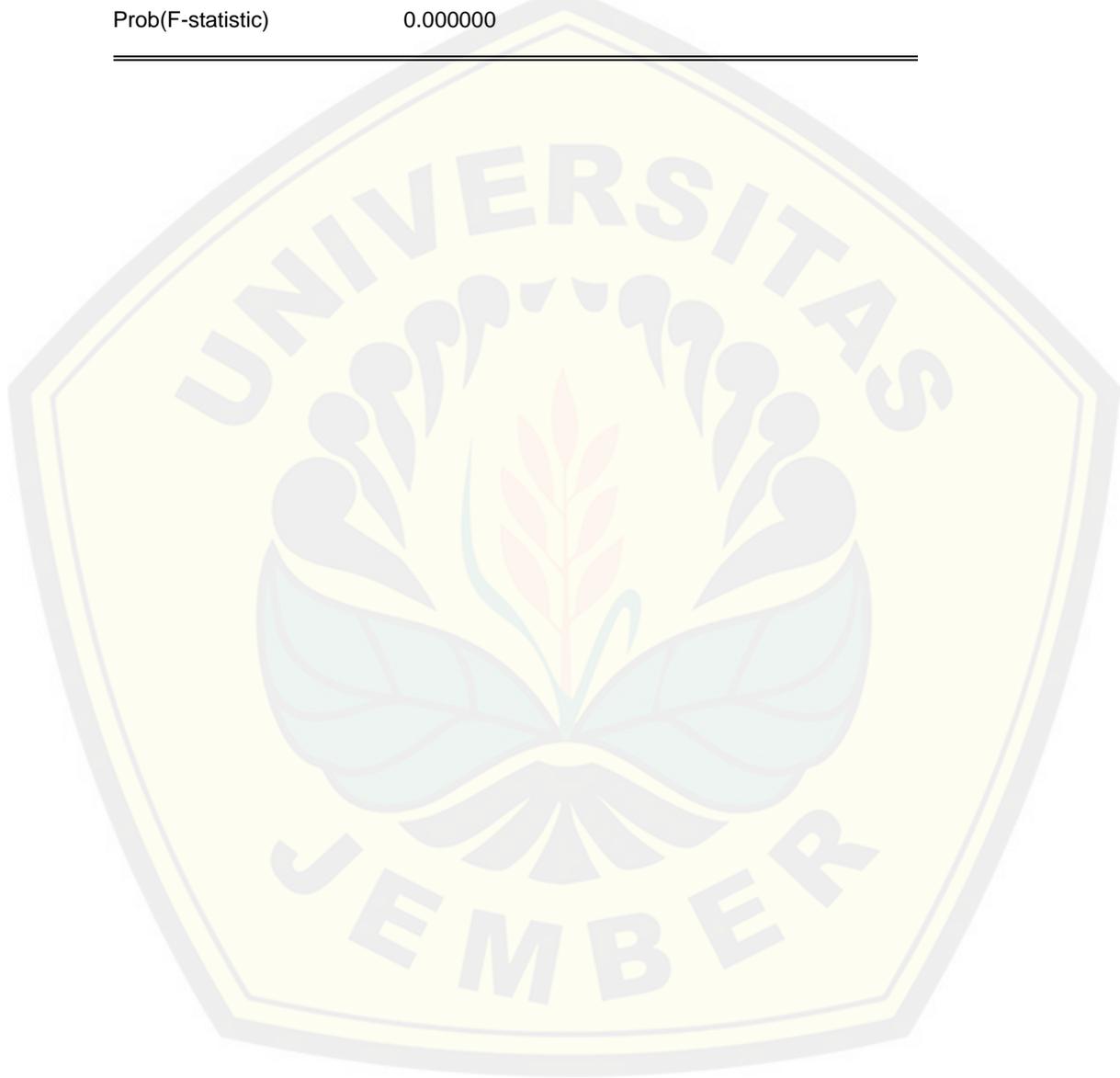
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-36831.92	17696.26	-2.081339	0.0403
X1	0.380373	0.039826	9.550977	0.0000
X2	0.131251	0.032487	4.040100	0.0001
X3	-0.371378	0.101273	-3.667088	0.0004

Effects Specification

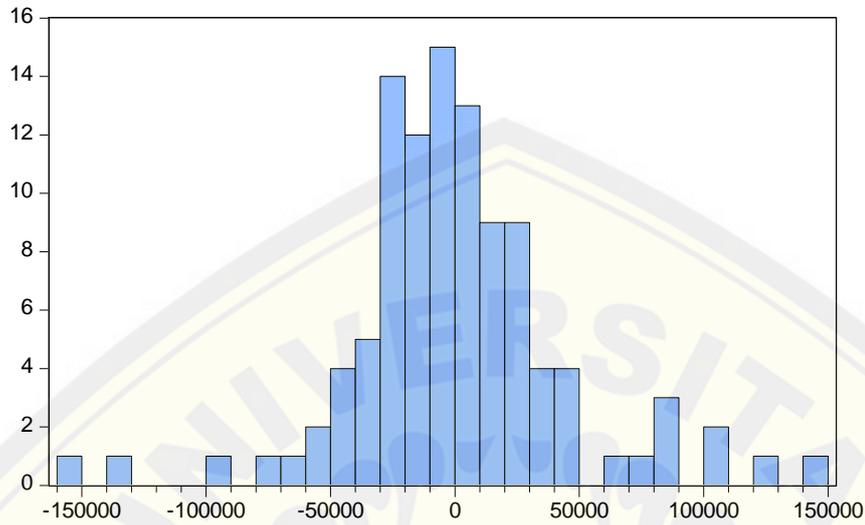
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.704039	Mean dependent var	66853.48
Adjusted R-squared	0.646208	S.D. dependent var	80987.36
S.E. of regression	48171.63	Akaike info criterion	24.55773
Sum squared resid	2.02E+11	Schwarz criterion	25.01270
Log likelihood	-1271.281	Hannan-Quinn criter.	24.74209
F-statistic	12.17399	Durbin-Watson stat	1.721198
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran F:

UJI NORMALITAS



Series: Standardized Residuals	
Sample 1 105	
Observations 105	
Mean	0.000000
Median	-2055.660
Maximum	142763.7
Minimum	-157014.0
Std. Dev.	44058.97
Skewness	0.186989
Kurtosis	5.805520
Jarque-Bera	35.04727
Probability	0.000000

Lampiran G:

UJI MULTIKOLINIERITAS

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.415571	0.116710
X2	0.415571	1.000000	0.593072
X3	0.116710	0.593072	1.000000

Lampiran H:

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 08/04/19 Time: 21:33

Sample: 1 105

Periods included: 7

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5903.577	8990.321	-0.656659	0.0131
X1	0.121511	0.020233	1.005622	0.1293
X2	0.032198	0.016505	1.950827	0.1143
X3	-0.003650	0.051450	-0.070943	0.6436

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.515613	Mean dependent var	29970.23
Adjusted R-squared	0.420963	S.D. dependent var	32161.18
S.E. of regression	24472.87	Akaike info criterion	23.20332
Sum squared resid	5.21E+10	Schwarz criterion	23.65829
Log likelihood	-1200.174	Hannan-Quinn criter.	23.38768
F-statistic	5.447567	Durbin-Watson stat	2.009516
Prob(F-statistic)	0.000000		